

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beragam corak budaya di Indonesia sudah sangat dikenal diberbagai sudut dunia. *Multicultural* adalah kata yang tepat disematkan untuk Indonesia karena memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, ras, dan juga agama yang berbeda-beda. Hampir disetiap wilayah Indonesia memiliki lebih dari satu perbedaan diantara kelima bidang yang disebutkan sebelumnya. Manusia memiliki kodrat sebagai makhluk sosial dengan hidup saling berdampingan dan juga saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Kata sosial menurut Keith Jacobs yakni adanya sesuatu yang telah dibangun dan dijalankan di sebuah situs terhadap komunitas. Pada dasarnya setiap perbedaan yang ada dalam masyarakat memiliki suatu tingkat kerumitan yang tinggi. Perbedaan menjadi faktor utama terjadinya perselisihan sosial maupun politik dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu batasan-batasan atau peraturan dianggap penting dalam hal tersebut guna mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Dikenal dengan sebutan negara multikultur, dalam kancah perpolitikan guna memberikan wadah atau tempat untuk menyeleksi ataupun mempersatukan pemikiran dari berbagai perbedaan menjadi satu cita dan satu kesatuan tujuan, Partai politik adalah tempat yang cukup ideal untuk urusan tersebut. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka Partai- Partai politik telah lahir secara

spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (Bambang Sunggono, 1992).

Stratifikasi sosial ikut membentuk sebuah keragaman yang begitu deferensial pada masyarakat Indonesia. Kesetiaan yang harus diamanahkan kepada warga negara tidak menutup kemungkinan bahwa setiap warganya memiliki kesetiaan ganda sesuai dengan porsinya. Menurut Surbakti meskipun setiap warga negara harus menjaga kesatuan negara akan tetapi mereka juga memiliki keterikatan dengan identitas kelompok mereka. Mereka sepakat hidup bersama sebagai bangsa berdasarkan kerangka politik dan prosedur hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat. Kesempatan ini digunakan oleh para warga negara untuk memberikan suatu dedikasinya kepada bangsa dan kelompoknya.

Jadi, mereka membangun ideologi dan kekuatannya masing-masing. Ideologi dan kekuatan itu bisa dilihat dari berbagai organisasi masyarakat atau ormas yang lahir di negara ini. Kekuatan yang dibangun tidak hanya berupa finansial namun juga memberikan pengaruh ideologi pada tatanan negara republik Indonesia atau dalam arti ikut menyuarakan aspirasinya di parlemen hingga sekarang. Organisasi masyarakat atau ormas sejatinya dapat dibagi kedalam beberapa aspek sosial seperti organisasi masyarakat berbasis agama, organisasi masyarakat berbasis sosial dan budaya, serta organisasi masyarakat berbasis nasional atau politik.

Berbeda dengan Partai politik yang hanya memperlihatkan batang hidungnya pada tahun-tahun politik, ormas terlihat bergerak lebih dinamis dan fleksibel. Sesuai dengan namanya organisasi masyarakat menjadi kepanjangan

tangan dari semua aspirasi, tujuan, wadah cita-cita terdekat bagi masyarakat untuk ikut serta membantu dan mewedahi masyarakat lainnya tanpa adanya ikut campur tangan pemerintah. Organisasi masyarakat berbasis agama terlihat lebih dominan daripada organisasi masyarakat berbasis yang lain. Saat ini ada lebih dari ribuan ormas berbasis agama islam yang terdapat di Indonesia. Setiap ormas islam memiliki ciri khas tersendiri baik dari ideologisnya, gerakan-gerakannya, maupun yang paling mendasar adalah dari corak warna yang dipakai dalam seragamnya setiap melakukan aksi.

Kini organisasi masyarakat berbasis agama islam sudah sangat berkembang pesat. Kuantitas jumlah ormas islam di Indonesia terlampaui banyak. Hal ini berbanding lurus dengan kemampuan kontroling sosial. Menurut Bruce J. Cohen kontrol sosial adalah sarana atau metode yang digunakan untuk berperilaku selaras dengan kehendak rakyat dalam kelompok besar atau khusus. Sejatinya kemampuan kontrol sosial atau pengendalian sosial adalah milik pemerintah namun seiring berkembangnya kemampuan alat pikir manusia, kemampuan tersebut akan dimiliki oleh baik individu atau kelompok yang memenuhi syarat-syarat kekuatan untuk dapat masuk dalam lingkaran pengendali sosial.

Front Pembela Islam atau kerap kita sebut FPI merupakan salah satu dari sekian banyaknya ormas islam yang berhasil menjadi pusat perhatian dalam kurun beberapa tahun waktu lalu. Tepatnya pada tahun politik 2014 sampai dengan 2017. Pergulatan ormas-ormas berbasis agama sejak dulu memang terlihat kerap mewarnai keseimbangan kehidupan sosial dan politik di Indonesia

salah satunya yaitu Front pembela islam atau FPI. FPI pimpinan Al-habib Rizieq Syihab terlihat selalu ikut andil dalam catatan hitam kelamnya kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Melalui kekokohan prinsip dan pemikiran yang dituangkan disetiap gerakan-gerakannya menjadikan FPI patut di perhitungkan. Dengan kalimat-kalimat membara para petuah FPI menyulut api semangat yang sangat besar kepada ribuan pengikutnya. Sumbangsih FPI mampu mengontrol keseimbangan sosial dan politik di Indonesia.

Dikutip dari Al-Zastrouw Ngatawi (2006) Jika dilihat eskalasi atau peningkatan gerakan FPI pada aspek sosial, politik, dan juga keagamaan nya akan terlihat lebih menonjol pada aspek sosial dan politiknya. Memang jika dilihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya FPI, tampak jelas bahwa kelahiran FPI tidak bisa lepas dari peristiwa reformasi sebagai momentum perubahan sosial-politik di Indonesia.

Kiprah Front Pembela Islam (FPI) sebagai sebuah gerakan sosial yang konsisten dalam mengedepankan politik identitas islam yang selanjutnya menciptakan sebuah klasifikasi identitas secara absolut pada satu kelompok tertentu, di satu sisi dapat menjadi perekat namun di satu sisi lainnya dapat menjadi sumber konflik. Sebagai kelompok yang menonjolkan identitas islam, FPI sendiri sejak berdirinya memang terlibat dalam kegiatan keagamaan dan juga aktif dalam upaya membantu pemerintah untuk mengurangi permasalahan sosial kemasyarakatan diantaranya seperti aksi *sweeping* pada tempat-tempat prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan obat-obatan terlarang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam islam. FPI juga memiliki peran yang besar

dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ikut serta dalam membantu penanganan korban bencana alam.

Tergambar jelas bahwa munculnya kelompok identitas agama dalam hal ini yakni islam, sebagaimana dipresentasikan oleh salah satunya yaitu FPI dipicu oleh bukan semata-mata faktor agama itu sendiri, namun adanya latarbelakang yang berbeda-beda diantaranya sebagai reaksi atas marginalisasi dan respon atas hegemoni politik nasional maupun global.

Naiknya Joko widodo menjadi presiden diiringi pula dengan kenaikan jabatan Basuki Tjahaja Prunama (Ahok) sebagai Gubernur di DKI Jakarta. Kita ketahui sendiri bahwa suku, ras, budaya dan juga agama merupakan komponen yang melekat pada sosial-politik. jadi, jika salah satu komponen tersebut mengalami sebuah gesekan maka akan muncul sebuah peluang terbentuknya suatu perubahan pada tatananan kehidupan sosial-politik didalamnya.

Beberapa eskalasi atau peningkatan Gerakan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) selama masa pemerintahan Ahok diantaranya:

- 10 november 2014; Front Pembela Islam (FPI) menyelenggarakan sebuah Gerakan aksi tolak Ahok naik jadi Gubernur di DKI Jakarta.
- 14 oktober 2016; Front Pembela Islam (FPI) menyelenggarakan aksi bela islam I dengan menuntut agar penyelidikan atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera dilakukan.
- 4 november 2016; Front Pembela Islam menyelenggarakan Aksi bela al-Qur'an atau aksi damai/ masih pada suasana aski bela islam II

dengan tujuan untuk menindaklanjuti bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap telah menghina agama islam.

- 2 desember 2016; Front Pembela Islam (FPI) menyelenggarakan aksi damai/ aksi bela islam III.

Jika dilihat dari beberapa rentetan contoh aksi Gerakan yang dilakukan oleh FPI dari tahun ke tahun diatas apa yang menjadi faktor terbentuknya Gerakan tersebut. Apakah dari keadaan sosial-politik saat itu? Atau hanya karena Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pemimpin? Lalu, bagaimana jalannya kehidupan sosial-politik selama masa kepemimpinan Ahok di DKI?

Realitas tersebut sangat berdampak pada kehidupan bermasyarakat Indonesia yang multicultural dan menjunjung tinggi demokrasi dengan berlandaskan pada ketiga unsur penting yaitu unsur sosial, politik dan juga agama, dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sosial Politik terhadap Eskalasi Gerakan Front Pembela Islam (FPI) Selama Masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Prunama (Ahok) Di DKI Jakarta 2014-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana kondisi sosial-politik selama masa pemerintahan Ahok di DKI Jakarta?
2. Apa pengaruh kondisi sosial-politik selama masa pemerintahan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 bagi eskalasi gerakan ormas Islam Front Pembela Islam (FPI)?

C. Batasan Masalah

Pengambilan pembatasan masalah untuk membatasi penelitian agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas jangkauannya, dalam judul “Analisis Sosial-Politik Terhadap Eskalasi Gerakan Front Pembela Islam Selama Masa Pemerintahan Ahok di DKI Jakarta)”. Memiliki batasan pada keadaan sosial-politik selama masa pemerintahan Ahok di DKI Jakarta terhadap eskalasi gerakan FPI (Front Pembela Islam).

D. Tujuan Penelitian

1. Memahami bagaimana kondisi sosial-politik selama masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menciptakan peningkatan atau eskalasi pada Gerakan Front Pembela Islam (FPI) di DKI Jakarta 2014-2017
2. Memberikan analisis kondisi sosial-politik selama masa pemerintahan Ahok di DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti bisa memberikan manfaat dalam proses berjalannya keilmuan politik di Indonesia dan Penelitian ini akan menyajikan hasil analisis bagaimana keadaan sosial-politik selama masa pemerintahan Basuki Tjahay Purnama (Ahok) mempengaruhi terbentuknya peningkatan atau eskalasi Gerakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat islam yakni front pembela islam (FPI) di DKI Jakarta 2014-2017. Memahami korelasi bagaimana keadaan sosial-politik saat itu dengan adanya sebuah eskalasi gerakan yang dialami oleh organisasi massa islam FPI.